

**ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL MENYONGSONG ABAD XXI:
Pembangunan Yang Berwawasan Kebangsaan**

**Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan pada Kongres Pemuda/KNPI VIII
Jakarta, 29 Oktober 1996**

I. Pendahuluan

Memenuhi permintaan pengurus pusat KNPI, saya akan berbicara mengenai arah pembangunan nasional selama pembangunan jangka panjang kedua. Dalam acara kongres ini, mulai hari ini Saudara akan menerima masukan-masukan mengenai berbagai aspek pembangunan nasional selama empat hari berturut-turut. Saya harapkan apa yang akan saya sampaikan ini dapat mengantarkan Saudara mengikuti seluruh rangkaian pembahasan tersebut.

Dewasa ini dunia sedang bergerak menuju abad baru. Yang akan berganti bukan hanya abadinya, dari abad ke-20 ke abad ke-21, tetapi seluruh segi kehidupan sedang dalam perubahan. Sama dengan dunia pada waktu meninggalkan abad ke-19 memasuki abad ke-20, sulit dapat dibayangkan bagaimana pola kehidupan umat manusia pada seperempat atau setengah abad yang akan datang. Ketidakpastian, itulah yang merupakan masalah yang harus dihadapi pada waktu menyusun Repelita VI karena kita ingin juga mempunyai gambaran jangka yang lebih jauh lagi, yaitu 25 tahun ke depan.

Bagi kita juga makin tidak mudah untuk mengarahkan pembangunan karena peran masyarakat, dalam hal ini dunia usaha, makin besar. Memang demikian yang dikehendaki oleh GBHN, yaitu bahwa, dalam PJP II, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang terbuka dan ekonomi yang makin berorientasi pasar, pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah makin canggih.

Dalam kondisi demikian itu, kita mencoba merancang masa depan. Jelas tidak mudah, dan tidak mungkin tanpa mengalami pergeseran dalam perjalanannya. Namun, yang penting adalah bahwa kita telah memiliki wawasan masa depan, sehingga arah pembangunan terang dan jelas.

II. Arah Pembangunan Nasional Dalam PJP II

GBHN mengamanatkan bahwa dalam PJP II bangsa Indonesia bukan hanya harus makin maju dan sejahtera, tetapi juga makin mandiri. Titik berat pembangunan adalah bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) ingin dikejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju, dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri.

Dengan pengarahan itu, dicoba disusun bagaimana wujud masa depan tersebut, yang dapat diperkirakan mampu dicapai dalam 25 tahun.

Seperti negara-negara lain yang telah lebih dahulu maju, Indonesia menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan. Pembangunan dalam sektor ini tidak terpisah tetapi diarahkan untuk saling mendukung dengan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi tidak hanya memperbanyak jumlah pabrik, tetapi menyangkut proses pergeseran yang amat mendasar dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, dari masyarakat tradisional

menjadi masyarakat modern, dan dari masyarakat perdesaan ke masyarakat perkotaan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut kita menempatkan sasaran-sasaran PJP II yang beberapa pokoknya adalah sebagai berikut.

Pertama, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan nyata dan cukup berarti. Laju pertumbuhan diusahakan untuk tercapai dan terpelihara pada tingkat yang cukup tinggi, yang selama PJP II kita perkirakan rata-rata di atas 7% per tahun. Dalam pada itu, laju pertumbuhan penduduk sudah akan di bawah 1%. Dengan demikian, dalam 25 tahun pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat **empat kali** dalam nilai riil. Pertumbuhan yang cepat tersebut didorong oleh perubahan kuantitas dan kualitas faktor produksi dan perkembangan teknologi.

Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, ekonomi Indonesia pada waktu itu sudah akan berkembang menjadi ekonomi yang besar (sekitar US\$980 miliar dengan harga tahun 1993). Bahkan apabila disesuaikan daya beli relatifnya (purchasing power parity) akan menjadi sekitar US\$2,0 triliun.

Volume ekonomi yang meningkat demikian, besar akan menjadi pasar yang dinamis, dan dengan demikian menjadi pendorong bagi pertumbuhan produksi dalam negeri. Pasar ekspor yang diperkirakan juga akan berkembang, dengan perdagangan dunia yang makin tanpa hambatan, masih tetap akan merupakan penunjang pertumbuhan industri.

Kedua, dengan dinamika ekonomi yang demikian proses transformasi struktural akan berlangsung, sehingga peran sektor industri dalam perekonomian akan meningkat menjadi sekitar sepertiga pada akhir PJP II dari sekitar seperlima pada akhir PJP I.

Perubahan juga akan terjadi pada struktur ketenagakerjaan. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa akan makin cepat. Angkatan kerja akan makin terdidik, sekurang-kurangnya sudah berpendidikan 9 tahun dan sebagian besar 12 tahun, ditambah pengetahuan keterampilan. Peran tenaga profesional, teknisi, dan ketatalaksanaan akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Begitu pula, peran sektor formal dalam penciptaan lapangan kerja dan usaha makin meningkat. Berbagai hal itu menunjukkan meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan besaran produksi dan sifat-sifat struktural yang demikian, ekonomi Indonesia pada akhir PJP II sudah akan tergolong ekonomi industri (industrial economy).

Ketiga, proses ini akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat, yang akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal. Kelas menengah ini terdiri atas tenaga kerja profesional dan para pengusaha menengah yang mandiri. Hal ini berkaitan dengan perbaikan dalam struktur dunia usaha. Dalam PJP II diharapkan berkembang lapisan pengusaha menengah yang kukuh, yang akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang makin kuat, dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas basisnya.

Keempat, seperti halnya negara industri lainnya, pada saat itu Indonesia sudah akan makin kuat ketahanan ekonominya. Lembaga-lembaga ekonomi yang penting bagi masyarakat sudah berfungsi dengan mantap. Ketergantungan pada alam sudah sangat berkurang. Tata niaga sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip pasar dan bersifat transparan. Dengan demikian fluktuasi dalam persediaan bahan pokok di dalam negeri sudah tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara.

Kelima, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Pada akhir PJP II Indonesia sudah bukan lagi negara yang menerima pinjaman lunak. Neraca pembayaran sudah akan mantap. Kita akan makin mengandalkan perolehan devisa dan kesehatan neraca pembayaran dari perdagangan dan tidak lagi dari bantuan luar negeri. Hal ini sejalan dengan kemampuan pembangunan yang makin mandiri. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada pinjaman,

karena pinjam-meminjam adalah praktik yang biasa dalam kehidupan ekonomi. Pinjaman tidak merupakan faktor yang terlalu mengganggu kesehatan perekonomian.

Keenam, masalah kemiskinan absolut telah terselesaikan. Bagaimana pun, kemajuan ekonomi hanya akan ada artinya bagi kesejahteraan rakyat, apabila rakyat dapat menikmati dan merasakannya sebagai perbaikan hidup yang nyata. Oleh karena itu, dalam PJP II, salah satu program yang terpenting adalah penanggulangan kemiskinan. Kita mengharapkan, pada akhir Repelita VII masalah kemiskinan absolut, artinya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian besar sudah akan terselesaikan. Mungkin hanya tersisa di kantong-kantong kemiskinan yang sulit terjangkau, yang upayanya harus dilanjutkan sehingga sebelum PJP II berakhir masalah ini telah tuntas terselesaikan.

Ketujuh, kesenjangan pembangunan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan makin berkurang. Meskipun dalam 25 tahun belum mungkin dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat diupayakan adalah mencegah agar jurang kesenjangan tidak makin melebar. Kawasan tertinggal akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap keteringgalan, dan dapat turut melaju dalam arus kemajuan ekonomi bersama kawasan lainnya yang telah lebih dulu berkembang. Misalnya, kawasan timur Indonesia akan dipercepat laju pertumbuhannya dengan berbagai inisiatif agar dapat mencapai rata-rata di atas kawasan barat. Pada akhir PJP II, prasarana dan SDM di kawasan timur sudah dapat menunjang pembangunan dan kegiatan ekonomi sehingga industri dapat berkembang.

Kedelapan, kesejahteraan rakyat yang makin meningkat, juga akan tercermin pada derajat kesehatan yang makin baik. Dalam PJP II, umur harapan hidup diharapkan dapat meningkat dengan sekurang-kurangnya 8 tahun sehingga menjadi 71 tahun. Keadaan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai sumber pokok produktivitas SDM (di samping pendidikan), sudah akan makin membaik. Upaya ke arah itu akan dimulai sejak usia dini, dengan berbagai program kesehatan masyarakat yang makin meluas jangkauannya dan meningkat kualitasnya serta perbaikan gizi secara mendasar. Salah satu program pokok ke arah itu adalah program makanan tambahan untuk murid sekolah dasar (SD), yang pada akhir Repelita VII nanti diharapkan sudah mencakup seluruh murid SD.

Kesembilan, pada akhir PJP II penduduk Indonesia sudah menjadi penduduk perkotaan. Artinya, penduduk perkotaan yang kini berjumlah sekitar 65 juta atau 35% dari total penduduk, akan meningkat menjadi sekitar 155 juta atau sekitar 60% dari total penduduk.

Urbanisasi membawa berbagai dampak dalam pembangunan. Meningkatnya konsentrasi penduduk dalam proses urbanisasi memungkinkan penyediaan pelayanan sosial dan berbagai kebutuhan dasar menjadi lebih mudah. Hal itu tercermin antara lain dalam meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan. Perkembangan wilayah perkotaan juga akan mendorong majunya wilayah perdesaan sekitarnya. Urbanisasi mengurangi tekanan penduduk di daerah perdesaan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang masih tetap besar perannya dan sudah ditangani secara industri.

Kesepuluh, secara keseluruhan proses transformasi ekonomi, akan berjalan bergandengan dengan transformasi budaya. Bangsa Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang makin tinggi, dengan penguasaan iptek yang makin canggih, dan dengan inter aksi yang makin intensif dengan dunia internasional, akan cepat tumbuh menjadi bangsa yang modern. Transformasi ekonomi dan budaya tersebut akan terjadi pada seluruh lapisan penduduk baik penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan.

Kesebelas, pada akhir PJP II, kualitas demokrasi akan makin meningkat, sebagai hasil dari peningkatan kualitas lembaga-lembaga sosial politik serta kualitas para pelakunya. Kehidupan masyarakat yang makin transparan, akan tercermin bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya termasuk di bidang politik.

Semangat pembaharuan dan sikap kritis yang sekarang sedang berkembang antara lain berkat keterbukaan akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Ini berarti bahwa

meskipun kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, cara kita melaksanakannya dapat terus-menerus disempurnakan dengan semangat itu. Berkembangnya lapisan menengah yang makin kuat juga akan memberi warna kepada kehidupan demokrasi dan mempengaruhi proses perubahan yang terus - menerus akan berlangsung.

Keduabelas, pada akhir PJP II, hukum telah makin mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum, yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan dan taraf pendidikan rakyat akan meningkat pula tuntutan keadilannya. Jalan yang paling utama bagi diperolehnya keadilan adalah hukum. Tidak ada negara yang maju dan modern, yang tidak bersendikan hukum, atau hanya bersendikan kekuasaan belaka. Hukumlah yang akan melindungi masyarakat dan setiap warga negara.

Ketigabelas, kita ditantang untuk menyerasikan kebutuhan akan ruang dan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan, agar pembangunan kita berkelanjutan. Saya yakin dengan pengalaman yang panjang, dan kesadaran yang kuat akan artinya memelihara lingkungan, dalam 25 tahun ini bangsa Indonesia akan menemukan formula keseimbangan antara kebutuhan pemakaian dan pelestarian sumber alamnya. Semuanya itu menjurus pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Demikianlah gambaran mengenai masa depan bangsa Indonesia pada akhir PJP II dalam berbagai aspeknya. Menjadi tugas generasi muda untuk mewujudkannya.

Pengalaman dalam berbangsa dan bernegara selama lima puluh tahun terakhir ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan prasyarat pembangunan. Oleh karena itu, pada bagian akhir ceramah ini, saya ingin berbicara mengenai wawasan kebangsaan dalam kita menyongsong abad ke-21 mendatang.

III. Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan

Saya ingin mengangkat masalah ini untuk mendapatkan perhatian saudara-saudara para tokoh gerakan pemuda di Indonesia, karena berbagai alasan.

Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi terutama di kalangan generasi muda. Seringkali disebut bahwa sifat materialistis telah menggantikan idealisme yang merupakan sukmanya kebangsaan. Kedua, ada kekhawatiran ancaman disintegrasi kebangsaan seperti yang terjadi di berbagai negara lain dewasa ini. Di berbagai negara tersebut paham kebangsaan telah merosot menjadi paham kesukuan, dan paham primordial lainnya. Ketiga, ada keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

Oleh karena itu, sungguh penting bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kita tidak sampai hanyut oleh pandangan-pandangan sesaat sehingga kehilangan hakikat diri kita sebagai bangsa.

Pertanyaan yang muncul adalah konsep kebangsaan yang bagaimana yang tepat untuk masa kini dan masa depan bangsa. Jawabannya jelas, hakikat wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia adalah yang termaktub di dalam jiwa pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menetapkan dasar dan tujuan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Paham kebangsaan Indonesia adalah paham yang memiliki landasan spiritual, moral dan etik, karena itu bersilakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia ingin membangun masa kini dan masa depan, di dunia dan akhirat. Paham kebangsaan Indonesia tidak menempatkan bangsa Indonesia di atas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia; karena itu, paham kebangsaan Indonesia mempunyai unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pula paham kebangsaan Indonesia mengakui adanya nilai-nilai universal kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk, tetapi satu dan utuh, paham kebangsaan Indonesia jelas bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ini

kemudian dituangkan dan dimantapkan dalam Wawasan Nusantara. Paham kebangsaan ini berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia adalah paham demokrasi, dan bertentangan dengan paham totaliter. Paham kebangsaan ini memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Yang merupakan tantangan bagi kita, khususnya bagi generasi muda dalam dunia yang penuh perubahan ini, adalah bagaimana mempertahankan watak kebangsaan itu dan memberinya makna yang relevan untuk masa mendatang, untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi.

Ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi pedoman kita, agar pembangunan bangsa Indonesia senantiasa dalam kendali cita-cita bangsa ini sejak dilahirkannya.

Pertama, memelihara dan memantapkan keyakinan akan kebenaran falsafah, landasan, dan sistem yang kita tempuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena zaman berubah, pengetahuan manusia juga bertambah, kehidupan makin rumit, maka penerapan berbagai gagasan dasar itu harus bersifat luwes dan dinamis, tidak bersifat statis dan kaku. Hal ini tidak mudah karena kalau kita tidak hati-hati, yang bisa terjadi adalah kita terbawa arus dan akhirnya kehilangan pegangan dan bahkan membuat kita meninggalkan paham dasar kita.

Tantangan yang sesungguhnya kita hadapi adalah memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan, dalam keadaan di mana begitu banyak tarikan-tarikan untuk memecahnya, antara lain juga karena emansipasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta keterbukaan berkat revolusi informasi.

Kedua, secara lebih luas lagi, rasa kebangsaan kita pahami sebagai kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa akan berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan inilah yang melahirkan semangat kebangsaan yang memiliki ciri khas, yaitu rela berkorban demi kepentingan tanah air, atau semangat patriotisme. Semangat patriotisme ini harus senantiasa menyala dalam tubuh bangsa kita, terutama generasi muda. Pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam hingar-bingarnya globalisasi dan mondialisasi nilai-nilai, kita harus memperkuat jiwa kebangsaan dengan semangat patriotis. Di bidang ekonomi, pengejawantahannya adalah mengutamakan penggunaan karya bangsa sendiri, suatu ungkapan rasa kebangsaan yang sangat aktual untuk masa kini dan masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan yang datang dengan globalisasi dan pengintegrasian ekonomi dunia. Di bidang-bidang lain, politik dan kebudayaan, semangat itu harus kita terapkan dalam wujud-wujud yang nyata pula dalam kehidupan kita sehari-hari.

Ketiga, tantangan yang paling besar dan paling segera kita hadapi adalah bagaimana mengatasi masalah kesenjangan, yang menurut pendapat saya adalah sumber ancaman yang paling utama terhadap keutuhan bangsa kita. Masalah kesenjangan, jika tidak berhati-hati dan tidak ditangani secara tepat, mempunyai potensi makin besar dengan deregulasi. Upaya deregulasi sebagai penyesuaian diri terhadap globalisasi membuka persaingan lebih leluasa, dan yang kuat dan mampu bersaing akan lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah.

Persoalan kesenjangan ekonomi, termasuk masalah pengangguran bisa cepat bernetamofosa menjadi masalah politik seperti SARA, apakah itu konflik agama, ras, atau suku. Ia menjadi pupuk yang menyuburkan unsur-unsur penyebab destabilisasi dalam masyarakat, seperti gerakan neokomunisme, antikemapanan, dan kriminalitas.

Dengan latar belakang pemikiran demikian, maka upaya-upaya pemerataan

pembangunan, yang sekarang ini kita beri perhatian khusus, harus dipandang pula sebagai langkah strategis dalam rangka pengamalan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kalau semangat kebangsaan kita akan dihadapkan kepada sesuatu, kepada “musuh”, maka yang harus “diperangi” sekarang -- selain “musuh alamiah” seperti ancaman dari luar, musuh ideologi, dan pemecah belah persatuan bangsa -- adalah juga pengangguran, kemiskinan, kebodohan, keteringgalan, dan ketidakadilan. Itulah musuh-musuh nasionalisme kita dalam meninggalkan abad ke-20 memasuki abad ke-21.

Aspek ini amat penting saya kemukakan kembali pada kesempatan ini, pada saat kita baru saja memperingati hari Sumpah Pemuda. Rasa kebangsaan akan menjadi kuat kalau ada rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar, berlawanan arah dengan solidaritas sosial, yang menjadi perekatnya rasa persatuan dan kesatuan suatu masyarakat atau bangsa.

Oleh karena itu, dengan semangat kebangsaan kita membangun masyarakat yang makin berkeadilan sehingga makin memperkuat solidaritas sosial. Sebaliknya, solidaritas sosial yang kukuh akan menjadi landasan yang kuat bagi wawasan kebangsaan suatu bangsa.

IV. Penutup

Dalam menghadapi masa depan yang kita tahu akan makin berat dan rumit, meskipun penuh harapan, kita memerlukan pegangan yang kuat, agar arah perjalanan bangsa kita senantiasa mantap menuju tujuan yang dicita-citakan. Di sinilah generasi muda berperan sebagai kader dan pemimpin di masa depan.

Sebagai bangsa, kita sadar betul posisi kita, di mana kita berada, dan ke arah mana kita berjalan. Kita juga sudah memiliki tujuan yang jelas, dan menyadari bahwa mencapai tujuan itu tidak akan mudah. Namun, dengan semangat juang yang kuat, keyakinan yang kukuh, dan derajat rasionalitas yang tinggi, kita berusaha untuk mencapai tujuan itu. Yang berada di jajaran paling depan dalam barisan, kita harapkan adalah para pemuda. Para pemuda harapan bangsa adalah yang memiliki visi, berjiwa kebangsaan, dan memiliki pengetahuan serta semangat untuk mengubah cita-cita menjadi kenyataan.

Saya mengharapkan Kongres Pemuda ini dapat melanjutkan tradisi Kongres Pemuda tahun 1928 yang pada waktu itu merintis jalan ke arah terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu dan merdeka, dan sekarang merintis jalan ke arah terwujudnya masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.

Demikianlah sekedar sumbangan pikiran saya bagi Kongres Pemuda ini. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat berkongres. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai saudara-saudara dan kita semua dalam upaya besar membangun bangsa dan negara yang tercinta ini.